



file 09.01/84

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**Jalan Taman Suropati 2, Jakarta 10310
Telepon : (62) (021) 3843655 - 3905650**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP.007/M.PPN/09/2001
TENTANG
PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
DALAM NEGOSIASI *DECENTRALIZED BASIC EDUCATION PROJECT*
DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dalam pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan dasar, khususnya bagi daerah-daerah miskin, Pemerintah Republik Indonesia akan mendapatkan pinjaman dana dari *Asian Development Bank*;
 - b. bahwa untuk menjamin hasil guna dan dayaguna dana pinjaman tersebut diperlukan delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi pinjaman dengan pihak *Asian Development Bank* dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
 - c. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan, sesuai tugas dan fungsinya sebagai delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP. 031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *DECENTRALIZED BASIC EDUCATION PROJECT* DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK*.

PERTAMA : Menunjuk delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi *Decentralized Basic Education Project* dengan ADB pada tanggal 2-3 Oktober 2001 di Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Hasil negosiasi proyek desentralisasi pendidikan dasar (*Decentralized Basic Education Project*) tersebut dilaporkan kepada Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan Delegasi Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang dananya berasal dari APBN;

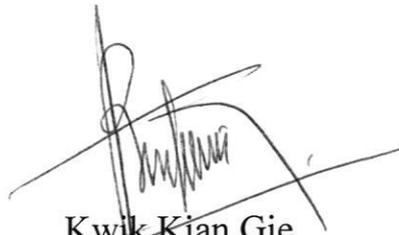
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 September 2001 sampai dengan selesainya negosiasi dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 28 September 2001

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Kwik Kian Gie

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP.007/M.PPN/09/2001
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2001

SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI
PROYEK PENDIDIKAN DASAR (*DECENTRALIZED BASIC EDUCATION
PROJECT*) DENGAN ADB

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Indra Djati Sidi
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional | Sebagai Ketua |
| 2. A. Anshari Ritonga
Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan | Sebagai Anggota |
| 3. Leila Retna Komala
Deputi Sumber Daya Manusia dan Pranata Pemerintahan
Bappenas | Sebagai Anggota |
| 4. Cahyana Admadjayadi
Direktur Jenderal Bina Pendayagunaan Potensi Daerah
Departemen Dalam Negeri | Sebagai Anggota |
| 5. Husni Rahim
Direktur Jenderal Binbagais, Departemen Agama | Sebagai Anggota |
| 6. Umaedi
Direktur SLTP, Departemen Pendidikan Nasional | Sebagai Anggota |
| 7. Agus Rahardjo
Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas | Sebagai Anggota |
| 8. Soenardi Dwidjosusastro
Kepala Biro Hukum , Depdiknas | Sebagai Anggota |
| 9. Freddy Herman Tulung
Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral, Bapenas | Sebagai Anggota |
| 10. Edi Karsanto
Direktur Dana Luar Negeri, DepKeu | Sebagai Anggota |
| 11. Abdul Mukmin Siregar
Direktur Investasi dan Kerjasama Keuangan
Departemen Luar Negeri | Sebagai Anggota |

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS DALAM NEGOISASI

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Hamid Muhammad | Sebagai Ketua |
| 2. Yadi Haryadi | Sebagai Anggota |
| 3. Hermani Noor | Sebagai Anggota |
| 4. Sungkowo M,M.Si | Sebagai Anggota |
| 5. Mudjito | Sebagai Anggota |
| 6. Husaini Wardi | Sebagai Anggota |
| 7. Abdul Hamid | Sebagai Anggota |
| 8. Binar Ginting | Sebagai Anggota |
| 9. Yun Widiati | Sebagai Anggota |
| 10. Fanani | Sebagai Anggota |

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Kwik Kian Gie